

Menelan Hutan Indonesia

“Program Food Estate” baru di Indonesia akan mengakibatkan lebih banyak kelaparan dan mengancam masyarakat lokal, hutan setempat dan iklim global.



Maret 2021



Daftar isi

Ringkasan	3
Pengantar	4
Program Food Estate di Kalimantan	10
Pembelajaran: Proyek Pengembangan Lahan Gambut	13
Harta karun Kalimantan menyusut	15
Program Food Estate Baru di Papua	16
Pembelajaran: Proyek agrobisnis di Papua	20
Papua, surga yang hilang	22
Food Estate di Sumatra Utara	27
Kesimpulan	30
Tuntutan	33



Ringkasan

Serangkaian proyek yang disebut “Food Estate Program” baru-baru ini diumumkan pemerintah Indonesia. Informasi terbatas yang didapat dari pemerintah Indonesia mengindikasikan adanya tiga usulan proyek “food estate” yang keseluruhan membutuhkan total lahan sekitar 770.000 hektar di Kalimantan Tengah, 2 juta hektar di Papua dan 32.000 hektar di Sumatra Utara. Selain itu sejumlah rencana serupa lainnya di Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur dan daerah lainnya juga telah diumumkan.

Lahan untuk proyek-proyek ini akan melenyapkan hutan dari “hutan permanen” bagi peruntukan lainnya (tersirat akan terjadinya deforestasi) dengan luas 630.000 hektar di Kalimantan Tengah, 1,3 juta hektar di Papua dan seluruh proyek di Sumatra Utara (32.000 hektar). Namun angka-angka ini hampir tidak berindikasi karena data yang resmi bertentangan dengan data resmi yang diliris baru-baru ini.

Oleh karena dampak ekonomi dari Covid-19, kebutuhan untuk meningkatkan investasi di Indonesia dan meningkatnya krisis pangan, maka pemerintah Indonesia mengutamakan pembangunan "mega proyek Food Estate" dengan mengizinkan penebangan dan pembukaan lahan hutan yang luas. Proyek ini akan menawarkan keuntungan yang bagai durian runtuh dari hasil penjualan kayu, penanaman sawit dan komoditas tanaman ekspor lainnya di lahan yang dibuka.

Sejarah proyek serupa di masa lalu menunjukkan bahwa rencana ini akan sangat sedikit menjamin pangan sehat bagi penduduk setempat. Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) pernah dilakukan tahun 1996 di Kalimantan dan proyek lain yang lebih baru yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. Keduanya sedikit sekali berkaitan dengan pemenuhan pangan di Indonesia namun semuanya berperan untuk memperkaya segelintir orang yang korup. PLG menyebabkan bencana iklim global oleh karena besarnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari konversi lahan dan pembakaran gambut. Mengingat kesalahan di masa lalu dan mencermati kurangnya tindakan pencegahan maka wajarlah untuk menyangsikan “Program Food Estate” akan berhasil mengatasi kebutuhan pangan dan sebaliknya akan menghasilkan perampasan lahan skala luas oleh perusahaan yang tertarik pada tanaman ekspor, penggusuran masyarakat setempat dari tanah dan mata pencahariannya.

Meskipun bantuan pasca Covid sangat dibutuhkan, namun hal itu harus berdasarkan pada kebutuhan manusia. Spekulasi dan perampasan tanah hanya akan memperburuk krisis pangan dan dampak pandemi.

Keputusan memberikan lahan luas bagi agrobisnis raksasa untuk produksi komoditas ekspor juga melanggar legislasi Indonesia dan internasional yang menjamin hak-hak masyarakat lokal atas tanah adat mereka.

Bank, agen pembangunan dan institusi lainnya kemungkinan besar akan menerima permintaan untuk mendukung satu atau lebih proyek-proyek Food Estate sebagai bantuan pasca Covid. Mereka hendaknya tidak mendukung proyek yang merusak integritas ekosistem dan melanggar hak-hak masyarakat adat dan penduduk setempat atas tanah tradisi mereka dan melakukan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) atas setiap penggunaan tanah mereka.

Kata Pengantar

Juni 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan beberapa rencana “Program Food Estate” baru di Kalimantan Tengah, diikuti rencana kedua pada September 2020 “Program Food Estate Papua”. Proyek-proyek selanjutnya juga telah diumumkan untuk provinsi lainnya.¹ Rencana proyek ketiga berlokasi di Sumatra Utara dan diperkirakan akan lebih banyak lagi yang direncanakan untuk daerah lain.² Proyek-proyek ini akan mengkonversi hampir dua juta hektar hutan (1.969.704 ha) menjadi pertanian “food estates”. Pemerintah mengklaim³ bahwa proyek-proyek ini, berdasar regulasi sebelumnya,⁴ akan menggairahkan perekonomian dan mengatasi resiko kekurangan pangan akibat pandemi Covid-19, seperti yang disampaikan oleh FAO.⁵

Sangat sedikit informasi yang tersedia tentang dua mega proyek baru ini, tapi seperti yang kita ketahui dari proyek “food estate” sebelumnya inisiatif ini sedikit sekali berkenaan dengan penyediaan pangan bagi masyarakat lokal namun membuka kesempatan bagi perampasan tanah yang baru dan penebangan hutan secara masif oleh spekulasi yang mencari keuntungan dari penebangan dan produksi minyak sawit, gula dan tanaman ekspor lainnya.

Pada Oktober 2020 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yang mengkhawatirkan yaitu tentang cara mengimplementasikan program Food Estate. Peraturan baru itu mengizinkan pembukaan kawasan hutan yang selama ini dilindungi dan dikonversikan menjadi lahan pertanian.⁶ Menurut UU yang berlaku, kawasan hutan di Indonesia dilarang untuk perkebunan kecuali kementerian mengeluarkan ijin konversi hutan untuk dibuat lahan pertanian disana. Tapi di bawah peraturan yang baru (Pasal 19), operator perkebunan tidak perlu mengajukan ijin dan hutan-hutan yang dulunya dilindungi akan dirubah menjadi KHKP (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan). Ijin ini bisa berlaku selama 20 tahun dan bisa diperpanjang.

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate, year 2020, [http://sikutan.menlhk.go.id/dokumen/09%20Ringkasan%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional%20\(PEN\)%20Food%20Estate.pdf](http://sikutan.menlhk.go.id/dokumen/09%20Ringkasan%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional%20(PEN)%20Food%20Estate.pdf) and also Ministry of Environment and Forestry Regulation Number about Provision of Forest Area For The Development of Food estate: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia - Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_24_2020_PENYEDIAAN_KH_PEMBANGUNAN_FOOD_ESTATE_menlhk_11092020081519.pdf

² InfoPublik, HD Dukung Food Estate di Sumsel, August 2020, <http://infopublik.id/kategori/nusantara/477091/hd-dukung-food-estate-di-sumsel>

³ CNN Indonesia, Jokowi Soroti Peringatan FAO soal Risiko Krisis Pangan, April 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413154558-532-493084/jokowi-soroti-peringatan-fao-soal-risiko-krisis-pangan>

⁴ Regulation of cooperation in management of forest areas for food security, FP.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 <https://www.regulasip.id/regulasi/5674>

⁵ FAO, Emerging data suggest COVID-19 is driving up hunger in vulnerable countries, 9 June 2020, <http://www.fao.org/resilience/news-events/detail/en/c/1287545/> and FAO, Impacts of COVID-19 on food security and nutrition: developing effective policy responses to address the hunger and malnutrition pandemic, September 2020, <http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf>

⁶ Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, number P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 concerning the provision of forest areas for Food Estate Development, http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_24_2020_PENYEDIAAN_KH_PEMBANGUNAN_FOOD_ESTATE_menlhk_11092020081519.pdf

Selanjutnya program ini hanya mengizinkan konversi ke perkebunan industri, bukan untuk petani lokal.

Dengan meningkatnya krisis iklim, perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada hutan telah menjadi salah satu elemen penting bagi mitigasi. Faktanya Norwegia telah membayar 56 juta USD ke Indonesia untuk mengurangi deforestasi selama periode 2016-2017.⁷ Namun pengalaman terdahulu menunjukkan proyek “Food Estate” yang baru ini sangat mungkin akan membuka hutan hujan dan lahan gambut yang luas dan masih asli. Proyek ini juga mencegah regenerasi wilayah yang masih bisa dipulihkan, setelah sebelumnya dikeringkan dan ditebang untuk mega proyek PLG yang gagal di masa lalu. Emisi karbon dari proyek food estate baru akan menjadi relevansi global – karena rawa gambut yang dikeringkan mengeluarkan sejumlah besar gas rumah kaca. Emisi ini akan meningkat jika tanah gambut dibakar.

Disamping dampaknya pada hutan, biodiversitas dan iklim, proyek-proyek ini merupakan ancaman mengerikan bagi penduduk dan masyarakat adat. Mata pencaharian, ketahanan pangan dan integritas budaya mereka akan terancam jika mereka tergusur dari tanah tradisi mereka.



Program Food Estate mencakup reklasifikasi lahan luas sebagai “Kompleks Pertanian” untuk ketahanan pangan, meskipun kenyataannya program ini akan terus dikelola sebagai bagian dari kawasan hutan karenanya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ini bisa berarti daerah berhutan dan hutan yang telah gundul, termasuk hutan lindung (hutan lindung daerah aliran sungai atau Hutan Lindung - HL) dan tiga bentuk hutan lindung: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Kon-

⁷ The Jakarta Post, Indonesia to receive \$56 million from Norway for reducing emissions, May 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/22/indonesia-to-receive-56-million-from-norway-for-reducing-emissions.html>

versi (HPK). Perlu diperhatikan bahwa HP bisa diubah menjadi perkebunan tapi harus tetap untuk Kegunaan kehutanan (contohnya Hutan Tanaman Industri), sedangkan HPK bisa dibuka untuk kepentingan pertanian.⁸

Hasilnya akan mengubah penggunaan lahan hutan lindung hingga seluas 400.000 hektar (390.872,15 hektar) ditambah 70.000 hektar hutan tebang pilih (70.609,85 hektar) dan 180.000 hektar Hutan Produksi Tetap (184.924,75 hektar) dan lebih dari 1 juta hektar hutan yang siap di-konversi namun masih belum teralokasi oleh karena itu sebagian masih utuh (1.138.093,58 ha). Sesuai dengan data pemerintah hal ini akan menghasilkan deforestasi total seluas 630.000 hektar di Kalimantan Tengah, 1,3 juta hektar di Papua dan semua proyek di Sumatera Utara (32.000 hektar)⁹. Angka-angka ini harus dicermati dengan teliti karena lembaga pemerintahan yang berbeda melansir peta yang berbeda dan dalam beberapa kasus jumlahnya lebih tinggi.

Proyek baru yang diusulkan ini mengikuti sejarah “food estates” serupa di masa lalu seperti mega proyek padi di Kalimantan Tengah dan MIFEE di Papua. Sementara produksi pangan yang dijanjikan ternyata gagal, semua proyek itu telah menghasilkan kerusakan hutan hujan dan tanah gambut yang lebih besar lagi dan warisan kebakaran gambut terus menerus yang mengakibatkan buruknya kualitas udara di seluruh Asia. Penduduk dan masyarakat adat setempat telah mengalami hilang dan musnahnya tanah tradisi mereka dan dibiarkan sendiri untuk menghadapi rasa lapar dan pudarnya budaya mereka.

Proyek baru ini diumumkan di masa Pembatasan Sosial Skala Besar Covid-19 ketika masyarakat yang terdampak hidup di daerah terpencil yang sulit dijangkau orang luar ditambah terbatasnya jalur transportasi dan komunikasi jelas mem-

KATEGORI PENGGUNAAN LAHAN DI INDO-NEZIA	
HK	Hutan Konservasi Melestarikan biodiversitas hewan dan tumbuhan serta ekosistemnya (perlindungan yang ketat)
HL	Hutan Lindung Pengendalian Daerah Aliran Sungai Hutan dilindungi untuk melestarikan sistim hidrologi dan mencegah banjir dan tanah longsor (degradasi rendah)
H PT	Hutan Produksi Terbatas Penebangan intensitas rendah dengan hak ekstraksi terbatas (yaitu pembukaan lahan tidak diijinkan)
HP	Hutan Produksi Hutan Produksi: Tebang habis untuk ekstraksi kayu diijinkan dan lahan bisa dikonversi menjadi perkebunan tapi tetap menjadi bagian kawasan hutan
HPK	Hutan Produksi Konversi Tebang habis untuk kayu diijinkan dan lahan bisa dikonversi buat tujuan pertanian non-hutan. Namun di Papua bahkan hutan primer dapat diklasifikasikan sebagai HPK
APL	Area Peruntukkan Lain Areal di luar lahan hutan tapi mungkin tertutup oleh hutan (contohnya hutan milik pribadi atau kebun) atau tidak berhutan (contoh lahan pertanian, pemukiman)

⁸ Truly Santika et Al., Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities, September 2017, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378016305933>

⁹ Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, see footnote 1

buatnya tidak mungkin mendapatkan konsultasi yang terpercaya sesuai persetujuan bebas, di-dahulukan dan diinformasikan (FPIC) - yang dimuat dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP)¹⁰.

Mengapa Indonesia memilih mengulangi bencana proyek Pengembangan Lahan Gambut masa lalu dari pada fokus pada reformasi agraria yang sangat dibutuhkan serta perlindungan efektif bagi hutan, tanah gambut dan masyarakat adat?

Dunia mengalami dampak buruk dari perubahan iklim, hilangnya keragaman hayati, budaya, polusi dan kontaminasi tanah, air dan udara. Bahkan pandemi Covid-19 juga berasal dari parahnya krisis lingkungan.¹¹ Saat negara-negara berkumpul mendiskusikan pentingnya melindungi hutan untuk menjaga iklim global, tawaran program “Food Estate” malah bersiap mengambil langkah yang keliru, menggambar “solusi-berbasis-alam” yang bisa diterapkan di tempat lain.



Hal lain yang mengkhawatirkan adalah program Food Estate yang baru ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan - Prabowo Subianto¹², calon orang kuat yang sebelumnya dipecat dari ketentaraan karena mengorganisir penculikan 13 aktivis pro demokrasi, beberapa diantaranya disiksa.¹³

Bisa dicatat bahwa Prabowo memiliki tanah luas di beberapa tempat di Kalimantan (Kalimantan Timur).¹⁴

Penunjukkan Menteri Pertahanan dan pemimpin partai Gerindra ini untuk memimpin program Food Estate dan bukannya Menteri Pertanian nampak tidak konsisten. Tapi ketahanan pangan telah dideklarasikan sebagai bagian pertahanan nasional, sebuah konsep yang sejalan dengan pembentukan Badan Cadangan Pangan Strategis yang dikelola oleh militer.

Sejak era Soeharto dan bahkan sebelumnya, tentara terlibat di banyak bidang bisnis dengan keuntungan besar termasuk proyek agrobisnis sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Bisnis ini dijalankan secara langsung bersama perusahaan-perusahaan yang

¹⁰ United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>

¹¹ The Guardian, 'Tip of the iceberg': is our destruction of nature responsible for Covid-19? March 2000, <https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe>

¹² The Jakarta Post, Prabowo to oversee development of food estate program, Jokowi says, July 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/14/prabowo-to-oversee-development-of-food-estate-program-jokowi-says.html>

¹³ AsiaWeek, The Scapegoat?, March 2000, <https://web.archive.org/web/20140313050521/http://www-cgi.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/magazine/2000/0303/cover1.html>

¹⁴ CNBC Indonesia, Moeldoko Ungkap Jokowi Tunjuk Prabowo Komandoi Food Estate, July 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200716144948-4-173263/moeldoko-ungkap-jokowi-tunjuk-prabowo-komandoi-food-estate>

dimiliki tentara atau dengan tidak langsung melalui yayasan dan koperasi atau aliansi dengan perusahaan swasta. Sebagai hasilnya tentara menjadi salah satu penguasa ekonomi yang mengelola bisnis legal dan ilegal.¹⁵

Walaupun pada September 2004 telah disahkan Undang-Undang agar pemerintah mengambil alih pengawasan di semua bidang bisnis militer,¹⁶ namun bisnis independen militer belum pernah secara serius dibongkar.¹⁷

Sepanjang program Food Estate, Kementerian Pertahanan telah membentuk PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang berkantor pusat di gedung kementerian itu sendiri¹⁸ yang mengurus produksi tanaman pangan, perikanan, bioenergi dan konservasi. Perusahaan-perusahaan yang besar dipegang oleh tentara dan jajaran tinggi di partainya Prabowo - Gerindra¹⁹, meskipun hal ini dikecualikan oleh hukum di Indonesia²⁰. Menurut Law-Justice.co, sebuah media investigasi online, kegiatan agrobisnis Agrinas dijaga ketat oleh tentara²¹ dan keterlibatannya di program Food Estate di Kalimantan akan beresiko besar karena campur aduk antara bisnis pribadi, korupsi, kepentingan umum dan militerisasi wilayah. PT Agro Industri Nasional adalah salah satu perusahaan yang terkait korupsi ijin ekspor. Hal ini menyebabkan menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tokoh kunci di Gerindra), ditangkap pada 25 November 2020 setelah investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi.²²

Di program Food Estate di Kalimantan Tengah, tentara memimpin proyek perkebunan singkong. Tumbuhan singkong dijadikan target karena permintaan pasar yang besar atas produksi mie instant. „Wilayah yang diperlukan“ mencakup setengah juta hektar (486.164 ha²³). Pembukaan lahan telah dimulai di kabupaten Gunung Mas dipimpin oleh Kolonel Dwi Haryono²⁴, meskipun tidak terdapat informasi tentang studi penilaian lingkungan yang telah rampung.

Keterlibatan langsung tentara di proyek singkong bisa cukup mematahkan perlawanan pemilik tanah adat seperti masyarakat lokal dan masyarakat adat, karena pemerintah berpendapat bahwa

¹⁵ Human Rights Watch, Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities, June 2006, <https://www.hrw.org/reports/2006/indonesia0606/>

¹⁶ Law No. 34/2004 on the Indonesian Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia or TNI), http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF

¹⁷ Human Rights Watch, Unkept Promise, Failure to End Military Business Activity in Indonesia, January 2010, <https://www.hrw.org/report/2010/01/11/unkept-promise/failure-end-military-business-activity-indonesia>

¹⁸ PT Agro Industri Nasional is located in the building of the “Education and Welfare Foundation Housing” (YKPP) an institution the Indonesian Ministry of Defense. See: <https://www.linkedin.com/company/agrinas/about/>

¹⁹ Law-Justice.co, Elit Prabowo Kuasai Bisnis Pangan Baru Via Agrinas, October 2020, <https://www.law-justice.co/artikel/94820/elit-prabowo-kuasai-bisnis-pangan-baru-via-agrinas/>

²⁰ Law Number 25 of 2009 on Public Services, Art. 17, <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELEC-TRONIC/84185/105644/F1543891146/IDN84185%20IDN.pdf>

²¹ Law-Justice.co, see footnote 14

²² Okezone, Ditangkap di Bandara Soetta, Menteri KKP Edhy Prabowo Tak Sendirian, November 2020. Retrieved 25 November 2020, <https://nasional.okezone.com/read/2020/11/25/337/2315635/ditangkap-di-bandara-soetta-menteri-kkp-edhy-prabowo-tak-sendirian>

²³ Walhi, Food Estate; benarkah atas nama pemenuhan hak pangan? KLHS bukan stempel proyek food estate! February 2021, <https://www.walhi.or.id/rilis-food-estate-benarkah-atas-nama-pemenuhan-hak-pangan-klhs-bukan-stempel-proyek-food-estate>

²⁴ ExBulletin, This is an update for the Prabowo Cassava Plantation Project in Central Kalimantan, November 2020, <https://exbulletin.com/politics/576117/>

tanah air dan udara adalah milik negara“. Ini berarti tidak ada tanah adat²⁵ . Hal ini menjadi mengkhawatirkan mengingat Omnibus Law baru-baru ini, sebuah solusi tambal sulam yang merevisi 79 UU dengan 1228 Pasal dan mengenyampingkan banyak ketentuan yang menjamin hak-hak masyarakat lokal atas tanah adat mereka.²⁶

²⁵ CNBC Indonesia, Wamenhan Bongkar Rencana Besar Lumbung Pangan Jokowi-Prabowo, July 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/profil/20200710143131-41-171741/wamenhan-bongkar-rencana-besar-lumbung-pangan-jokowi-prabowo>

²⁶ Mongabay, Indonesia bill weakening environmental safeguards to pass in October, August 2020, <https://news.mongabay.com/2020/08/indonesia-omnibus-deregulation-bill-pass-october/>

Program Food Estate di Kalimantan

Rencana Food Estate yang baru di Kalimantan Tengah akan memberikan kewenangan hukum mendirikan daerah agrokultur baru yang mencakup 770.601 ha (hampir seluas DKI Jakarta ditambah Bogor). Untuk merealisasikannya 632.465 ha hutan akan dikonversikan menjadi perkebunan termasuk hutan hujan dan tanah gambut yang masih asli.²⁷

Proyek baru ini tumpang tindih dengan beberapa wilayah yang rusak akibat proyek PLG (lihat di bawah). Upaya pemulihan tanah gambut yang rusak dijalankan oleh Badan Restorasi Gambut yang dibentuk baru-baru ini hingga kini tidak berhasil.²⁸ Food estate baru menyatakan bahwa tanah gambut yang masih utuh akan dilindungi dan hanya “gambut dangkal” yang kedalamannya kurang dari 50 cm akan dibudidayakan.²⁹ Namun para ahli berpendapat bahwa gambut dangkal juga mengakibatkan emisi CO₂ dan beresiko untuk terbakar. Hanya membutuhkan beberapa tahun saja sebelum emisi itu menguap ke atmosfer.³⁰

Tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, pemerintah telah gagal lagi menjalankan konsultasi sebelumnya dengan masyarakat adat Dayak sebelum mengumumkan rencananya megkonversi tanah tradisi mereka menjadi “food estate”. Dengan demikian hal ini telah mempersiapkan arena bagi pelanggaran HAM dan perampasan tanah selanjutnya.

Proyek di Kalimantan Tengah akan membutuhkan biaya 68 triliun rupiah.³¹ Untuk biaya infrastruktur saja diperkirakan 6,7 triliun rupiah.³² Dana ini belum terkumpul dan kemungkinan akan diminta dari bank swasta atau negara dan lembaga keuangan internasional.

Untuk mengevaluasi dampak dari proyek ini adalah penting mengetahui perkembangan lainnya di wilayah yang sama dan kemungkinan dampak gabungannya. Kenyataannya program food estate bukanlah satu-satunya mega proyek di Kalimantan. Tahun 2004 Asia Development Bank (ADB) membantu apa yang disebut “West Borneo Economic Corridor” yang bertujuan menarik “investasi asing terutama dari perusahaan besar yang punya ketertarikan mendapatkan bahan mentah atau mengambil keuntungan dari faktor biaya produksi rendah”.³³

²⁷ Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, see footnote 1

²⁸ Eco-Business, Indonesia’s food estate programme to expand new plantations in forest frontiers, October 2020, <https://www.eco-business.com/news/indonesias-food-estate-programme-to-expand-new-plantations-in-forest-frontiers/>

²⁹ The Economist, On peat’s sake - Indonesia risks repeating an environmental disaster, August 2020, <https://www.economist.com/asia/2020/08/13/indonesia-risks-repeating-an-environmental-disaster>

³⁰ Deltares, Assessment of impacts of plantation drainage on the Kampar Peninsula peatland, Riau, November 2015, <https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/12/Plantation-Impacts-Kampar-Peatland-DELTAIRES-2015.pdf>

³¹ CNBC Indonesia, Ternyata Bangun Lumbung Pangan Jokowi Butuh Rp 68 T, July 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710190521-4-171849/ternyata-bangun-lumbung-pangan-jokowi-butuh-rp-68-t>

³² CNBC Indonesia, Ternyata Bangun Lumbung Pangan Jokowi Butuh Rp 68 T, July 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710190521-4-171849/ternyata-bangun-lumbung-pangan-jokowi-butuh-rp-68-t>

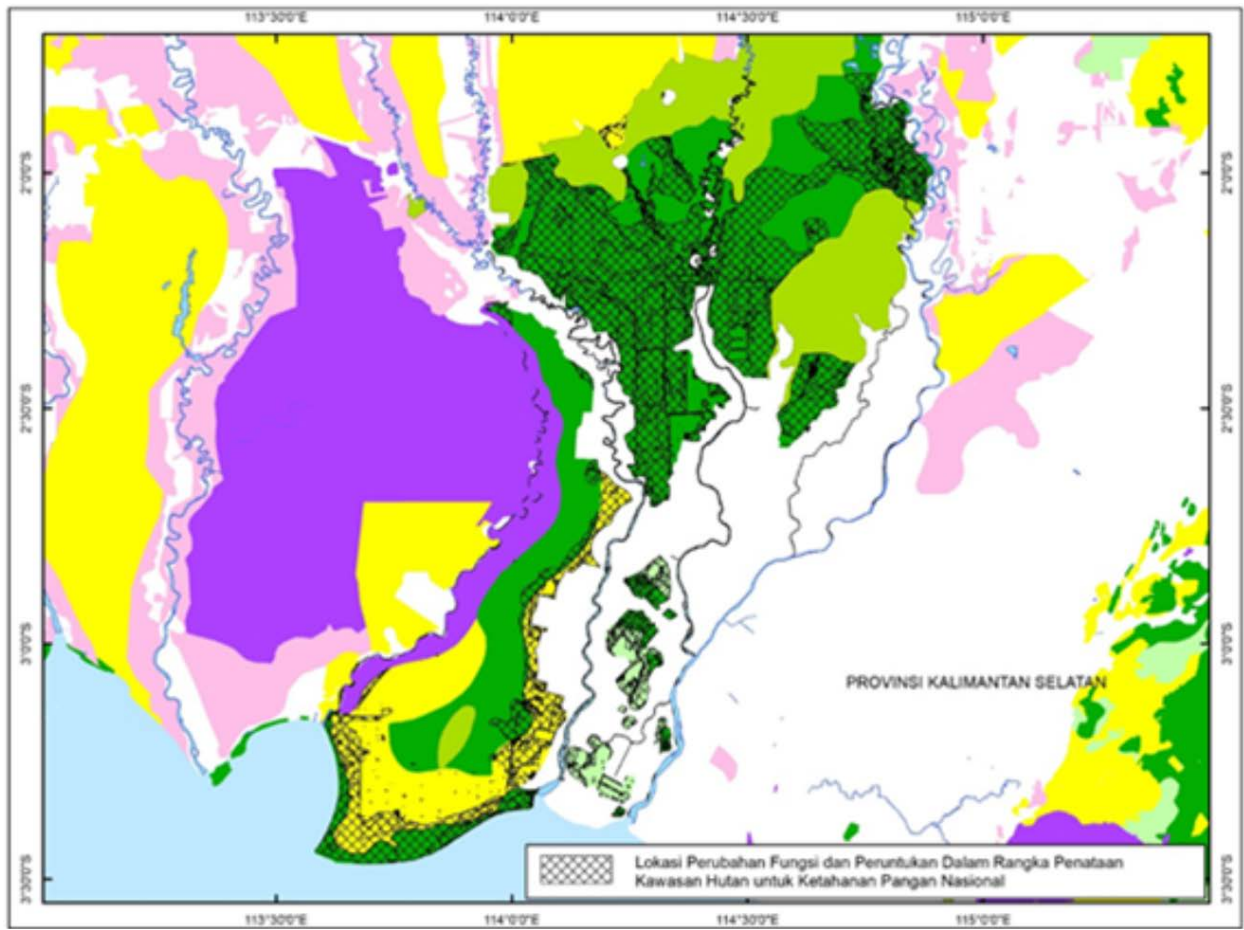
³³ A. Perdiguero, Special Border Economic Zone in IMT-GT and BIMP-EAGA Subregions. Session 4: Developing CBEZ and Economic Corridors, 2008, https://aric.adb.org/pdf/events/rci-week-2017/Day1_S4_APerdiguero.pdf

Extension of the Food Estate Program by regency and land use		
PROPOSED AREA	AREA FUNCTION	AREA (Ha)
KAPUAS	Protected forest (HL)	177,632.46
	Limited production forests (H PT)	12,380.45
	Permanent production forests (HP)	474.13
KAPUAS Total		190,487.04
PULANG PISAU	Protected forest (HL)	124,793.49
	Limited production forests (H PT)	5,814.96
	Permanent production forests (HP)	57,781.47
	Forest designed to conversion (HPK)	32.39
PULANG PISAU Total		188,422.31
BARITO SELATAN	Protection forest (HL)	45,960.06
	Forest designed to conversion (HPK)	11.16
BARITO SELATAN Total		45,971.22
KATIGAN	Permanent production forests (HP)	107.06
KATIGAN Total		107.06
PALANGKA RAJA	Protection forest (HL)	6,520.18
	Forest designed to conversion (HPK)	128.46
PALANGKA RAJA Total		6,648.84
Grand Total		43,637.27

Rencana rinci lahan konversi buat program Food Estate, berdasarkan penggunaan lahan yang telah diumumkan. Sumber: [Ministry of Environment and Forestry of Indonesia](#).

Juni 2016 Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang merupakan pihak pemberi dana pada China's Belt and Road Initiative, mengumumkan empat pinjaman. 2017 telah disetujui dana 100 juta USD lagi untuk ikut membiayai Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah Indonesia (RIDF) dengan Bank Dunia melewati perantara keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang "menyediakan pinjaman bagi proyek-proyek infrastruktur yang layak secara ekonomis".³⁴

³⁴ PT Sarana Multi Infrastruktur, 2015-2019 Strategy, https://www.ptsmi.co.id/wp-content/uploads/2016/01/SMI_In-sight_Q1_2015_IND.pdf



Peta bagian dari perencanaan Food Estate. Tolong dicatat warna hijau tua berarti hutan lindung. Sumber: [Ministry of Environment and Forestry of Indonesia](#).

Pembelajaran: Proyek Pengembangan Gambut Sejuta Hektar (PLG)

Progran Food Estate baru di Kalimantan ini menyusul proyek “pangan” sebelumnya di daerah yang sama – juga sebuah mega proyek. Proyek sebelumnya ini bermaksud mengolah satu juta hektar sawah untuk mencukupi pangan di Indonesia. Proyek ini dilakukan dengan hampir tanpa pikiran ke depan, konsultasi atau analisa dampak yang berakhir dengan kegagalan besar.³⁵ Setelah membuka lahan dan menanam padi baru diketahui bahwa tanah gambut terlalu asam dan kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan padi.

Sementara itu sejumlah besar petani direkrut untuk datang ke wilayah itu dibawah program transmigrasi pemerintah dan kemudian tinggal di sana. Kini mereka hidup di tanah tidak produktif dan di dalam kemiskinan serta jauh dari kampung halaman dan keluarganya.³⁶

Yang tersisa dari PLG adalah sebuah jaringan kanal sepanjang 6000 kilometer yang terus menguras air dari tanah gambut yang menyebabkan mengering dan terbakar. Perusakan tanah gambut di Kalimantan adalah sebuah krisis global – yang menyebabkan Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia³⁷ dengan lebih dari setengah total emisi negara dihasilkan dari perusakan tanah gambut.

Kebakaran tanah gambut telah menyebabkan polusi udara yang parah – krisis kesehatan masyarakat diseluruh Asia. 1997 terjadi musim kebakaran selama enam bulan yang mengejutkan dunia dengan foto-foto hutan dan desa yang membara, orang utan terbakar. Hampir tiap tahun tim relawan pemadam kebakaran berusaha dengan penuh bahaya namun tanpa harapan memadamkan api di daerah PLG. Api dan bara api di tanah gambut kering dapat menjalar ke bawah tanah sehingga pemadam kebakaran terjebak oleh api yang tiba-tiba menyembur ke permukaan. Pemerintah dan LSM telah berusaha memperbaiki tanah gambut dengan menutup kanal untuk mencegah air mengalir, tapi sayangnya setelah dikeringkan gambut tidak bisa lagi menyerap air sehingga tidak lagi mudah diperbaiki.

Proyek PLG Sejuta Hektar telah menyebabkan dampak lingkungan yang mengkhawatirkan³⁸ dan menghasilkan padi atau tanaman pangan lainnya yang sangat sedikit.³⁹ Sebenarnya proyek gagal besar bagi semua. Tapi sekelompok kecil usahawan yang kebanyakan kroni mantan diktator Suharto bertambah kaya dengan menjual kayu tropis di pasar internasional. Proyek ini telah

³⁵ The Economist, see footnote 26

³⁶ International Peatland Society, Indonesia planning new Mega Rice Project, November 2020, <https://peatlands.org/is-indonesia-heading-for-another-mega-rice-project-disaster/>

³⁷ World Resources Institute, 3 Things to Know for Designing Indonesia's Next Steps on Climate Change , October 2019, <https://www.wri.org/blog/2019/10/3-things-know-designing-indonesias-next-steps-climate-change>

³⁸ H Boehmm F. Siegert, Ecological Impact on the One Million Hectare Rice Project in Central Kalimantan, Indonesia, Using Remotes Sensing and GIS, November 2001 <https://crisp.nus.edu.sg/~acrs2001/pdf/126boehm.pdf> and Wim Giesenm Biodiversity and the ex Mega Rice Project in Central Kalimantan January 2009, https://www.researchgate.net/publication/328283058_BIODIVERSITY_AND_THE_EX-MEGA_RICE_PROJECT_AREA_IN_CENTRAL_KALIMANTAN Government of Central Kalimantan Government of Indonesia Government of the Netherlands Master Plan for the Rehabilitation and Revit

³⁹ Jenny Goldstein, “Carbon Bomb: Indonesia’s Failed Mega Rice Project.” Environment & Society Portal, Arcadia (Spring 2016), no. 6. Rachel Carson Center for Environment and Society. <https://doi.org/10.5282/rcc/7474>

membuka kesempatan bebas menebang sehingga lahan konservasi gundul⁴⁰ dan menjadi tanah gersang yang luas, masyarakat menjadi miskin dan terjadi pelanggaran HAM.

Food Estates baru diluncurkan tahun 2020, dengan kekurangannya yang sama yaitu analisa sebelumnya dan perencanaan yang matang untuk menghindari dampak negatif, sangat mungkin akan menghasilkan hasil yang sama. Dengan pernyataan memperhatikan pangan penduduk, proyek food estate bagai sang penyelamat yang merampas tanah demi kayu, minyak sawit serta serpihan kayu – seperti yang terjadi pada MIFEE (lihat di bawah).

⁴⁰ International Fund for Animal Welfare, another Environmental Disaster Looms in Indonesia, October 1997, <http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/envis/doc97html/biodfore1030.html>

Harta karun Kalimantan yang lenyap

Hutan di Kalimantan secara biologis menyimpan beragam habitat yang terbanyak di dunia dengan lebih dari 3000 jenis pohon, 2000 jenis anggrek dan 1000 jenis tumbuhan paku. Hutan disana juga menjadi habitat macan dahan, gajah kerdil dan orang utan yang hampir punah (orang utan mungkin keluarga kita terdekat yang bukan manusia).⁴¹ Kalimantan terus menciptakan keajaiban biodiversitas baru karena semakin banyak spesies yang terus ditemukan.

Lanskap di Kalimantan menawarkan sebuah mosaik habitat yang beragam: hutan bakau, rawa gambut dan hutan rawa, ulin, tegalan dan hutan pegunungan.⁴² Hutan hujan pegunungan di wilayah tengah di Kalimantan merupakan habitat luas terpencil yang menampung berbagai spesies pegunungan yang unik. Dari semua jenis burung endemik Kalimantan, duapuluh tiga diantaranya (73 persen) adalah pegunungan. Terdapat lebih dari 150 jenis mamalia dan 250 jenis burung di hutan hujan dataran tinggi dan menjadikan ekoregion ini terkenal dengan kekayaan mamalianya. Tempat ini adalah hutan hujan pegunungan yang paling berharga yang ditemukan di wilayah Indo-Pasifik.⁴³ Namun sebagian besar hutan hujan pegunungan belum lagi diteliti untuk dicatat flora dan faunanya.

Kalimantan adalah nama asli dari Borneo (bahasa sanskerta Kalimantan berarti pulau cuaca panas) dan tempat dari empat provinsi: Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Selatan dan Utara.

Sementara pulau Sumatra telah dirusak sepanjang tiga dekade oleh penebangan dan industri minyak sawit dan hutannya telah musnah atau sebagian besar terfragmentasi, kini deforestasi gencar dilakukan di Kalimantan bahkan sampai di daerah terpencil. Dampak perusakan ini bagi penduduk, masyarakat adat dan biodiversitasnya yang unik dan berharga merupakan bencana global. Ekspansi konversi hutan alam selanjutnya yang tersisa di Kalimantan menjadi perkebunan akan membawa perusakan ke titik yang tidak bisa dikembalikan lagi. Tolak perusakan alam!

⁴¹ University of Pittsburgh, Humans Related to Orangutans, Not Chimps, Says Study by Schwartz, Buffalo Museum of Science, June 2009, <https://www.chronicle.pitt.edu/story/humans-related-orangutans-not-chimps-says-study-schwartz-buffalo-museum-science>

⁴² WWF, About the Borneo forests, https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/borneo_forests/about_borneo_forests/ <https://www.chronicle.pitt.edu/story/humans-related-orangutans-not-chimps-says-study-schwartz-buffalo-museum-science>

⁴³ WWF, Southeastern Asia: the Island of Borneo, <https://www.worldwildlife.org/ecoregions/im0103>

Program Food Estate baru di Papua

September 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan Program Food Estate di Papua yang membutuhkan sekitar dua juta hektar lahan hutan tropis yang masih alami dan tanah gambut di daerah Merauke, Mappi dan Boven Digul.

Extension of the Food Estate Program by regency and land use		
REGENCY	AREA FUNCTION	AREA (Ha)
BOVEN DIGOEL	Protected forest (HL)	1,540.30
	Limited production forests (H PT)	5,546.41
	Permanent production forests (HP)	26,556.01
	Convertible production forests (HPK)	21,716.29
	Non-forest areas (APL)	239,485.21
BOVEN DIGOEL Total		294,844.23
MAPPI	Protected forest (HL)	247.33
	Limited production forests (H PT)	37,189.68
	Permanent production forests (HP)	7,591.07
	Forest designed to conversion (HPK)	63,415.71
	Non-forest areas (APL)	84,473.92
MAPPI Total		192,917.71
MERAUKE	Protection forest (HL)	23,177.33
	Limited production forests (H PT)	8,893.35
	Permanent production forests (HP)	55,911.01
	Forest designed to conversion (HPK)	1,052,789.57
	Non-forest areas (APL)	410,417.88
MERAUKE Total		1,551,189.15
Grand Total		2,038,951.09

Rencana rinci lahan konversi buat program Food Estate, berdasarkan penggunaan lahan yang telah diumumkan. Sumber: [Ministry of Environment and Forestry of Indonesia](#).

Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi disebagian pulau Guinea (sebagian lainnya adalah milik Papua Nugini). Pembentukan dua provinsi ini terjadi pada 2002 dan mendapat status otonomi khusus dibawah hukum Indonesia.

Program Food Estate di Papua telah diluncurkan tanpa memberikan informasi yang memadai. Presentasi pendek dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)⁴⁴, menunjukkan wilayah proyek yang terbentang di Merauke, Mappi dan Boven Digul, dengan total lahan 2.052.551 hektar termasuk 1.304.574 hektar hutan yang dikonversi. Sebagian besar hutan-hutan ini masih utuh. Beberapa diantaranya berada di tanah gambut dan semua itu adalah tanah tradisi masyarakat adat.

Kumpulan data geografis dari situs KLHK bahkan menunjukkan areal yang lebih besar lagi dengan bentangan lebih dari 3.234.657 hektar.⁴⁵

Seperti proyek Kalimantan, Food Estate di Papua dipromosikan sebagai stimulus Covid-19 untuk mengatasi ketahanan pangan. Namun perkebunan yang akan didirikan mungkin sangat sedikit berhubungan dengan pangan. Hanya sedikit lahan yang digunakan untuk sawah. Dan hasil dari proyek yang serupa sebelumnya (lihat di bawah) menunjukkan bahwa hasil utamanya kemungkinan besar dibukanya lebih banyak lahan untuk usaha semacam perkebunan komoditas ekspor (minyak sawit, serat kayu, mungkin tebu). Sementara masyarakat adat akan kehilangan kebunnya dan sumber makanan penting lainnya seperti tempat berburu dan dusun sagu.

Dokumen pemerintah september 2020 menunjukkan bahwa luas lahan proyek Food Estate Papua baru (2.038.951,09 hektar) meliputi tiga daerah dan menyertakan berbagai kategori penggunaan wilayah yang diidentifikasi dalam hukum dan adat Indonesia dan Papua.

Beberapa lahan hutan di daerah tersebut telah dibuka untuk dikonversi menjadi perkebunan. Lahan lainnya telah ditujukan untuk dikonversi dari hutan asli menjadi kegunaan lainnya seperti penebangan, meski kebanyakan lahan ini belum dialokasikan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.⁴⁶ Pemerintah menyebutkan bahwa daerah proyek akan mencakup 76.594,40 hektar dari apa yang disebut sebagai Hutan Lindung (HL) atau untuk hutan produksi terbatas (penebangan selektif). Hutan-hutan ini akan dibersihkan dan dikonversikan menjadi perkebunan. Tapi di daerah lainnya rencana itu akan mengarah pada pembukaan dua juta hektar hutan produksi (90.058,09 ha) dan hutan konversi. Wilayah yang mungkin dirancang untuk konversi tapi belum dialokasikan itu masih relatif utuh (dalam teorinya hutan produksi tidak bisa dikonversi menjadi penggunaan bukan hutan, tapi perkebunan monokultur industri seperti akasia atau eukaliptus untuk serat kayu masih dianggap pemerintah sebagai “penggunaan hutan”).

⁴⁴ Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, SHP_Lokasi_Pangan_4 PROVINSI, October 2020, https://drive.google.com/drive/folders/1ZMLQPV_imH3XrSUSwCuTv0fZWtzy2XJG

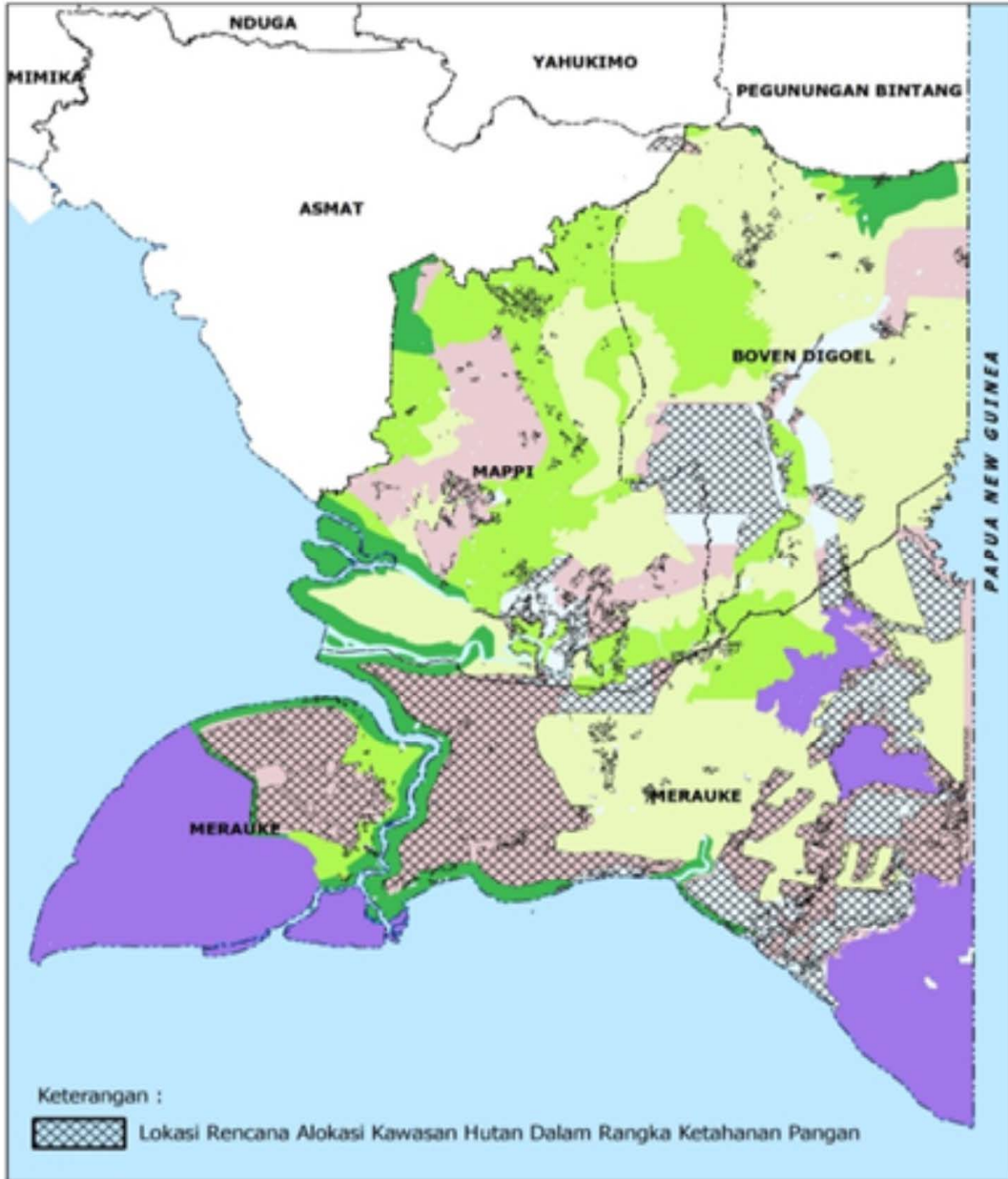
⁴⁵ Mongabay, Follow the permits: How to identify corruption red flags in Indonesian land deals, December 2019, <https://news.mongabay.com/2019/12/follow-the-permits-how-to-identify-corruption-red-flags-in-indonesian-land-deals/>

⁴⁶ Please note that in the government’s document quoted here, several agricultural plantation concessions are included in the *Food Estate Program area*, but there are no logging concessions. In the geo-database (see footnote 42), also shared by the Ministry of Environment and Forestry, there are no plantation concessions included, but are included several tree plantations concessions.

Saat ini terdapat sedikit informasi yang tersedia tentang perkiraan matang atas potensi dampak proyek ini terhadap tanah, perairan dan masyarakat setempat. Tidak ada inventaris ekologis atau budaya yang berdasarkan kondisi aktual. Tidak ada studi jangka pendek dan panjang atau dampak kumulatif dari proyek ini, meskipun sudah ada diskusi berkelanjutan tentang rencana seperti ini sejak 2007.

Selama rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah pada 17 september 2020, direktur jenderal perencanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan informasi yang menyarankan perencanaan lebih besar yang akan melibatkan 2.052.551 ha lahan, 1.304.574 ha diantaranya adalah hutan yang sesuai dengan susunan berikut:

- Perubahan penggunaan lahan hutan seluas 1.779.019 ha.
- Perubahan fungsi hutan lindung seluas 243.619 ha.
- Perubahan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 672.222 ha
- Perubahan fungsi Hutan Produksi (HP) seluas 863.178 ha.



Peta perencanaan Food Estate. Sumber: [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan](#).

Pembelajaran Proyek-proyek agrobisnis di Papua

Seperti Kalimantan, program Food Estate baru yang ditujukan untuk Papua akan mengikuti bencana di masa lalu: Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Proyek ini diluncurkan tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan tahun 2015 Presiden sekarang Jokowi mengeluarkan proyek serupa, kali ini mencakup konversi lahan 1, 28 juta ha menjadi pertanian. Tujuannya adalah menjamin swasembada Indonesia dalam hal pangan dan energi. Lahan itu akan diberikan kepada 45 perusahaan untuk dibuat budidaya tanaman.

Perlu diperhatikan bahwa “food project” fokus pada beras, minyak sawit, tebu dan komoditas lainnya yang digunakan untuk pangan di Jawa, bukan di Papua. Masyarakat di sana kebanyakan makan sagu, juga hewan hutan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena itu menebang pohon sagu untuk produksi beras adalah ancaman nyata langsung bagi ketahanan pangan lokal.

Bagaimanapun juga proyek ini telah gagal memproduksi tumbuhan pangan dalam jumlah besar. Produksi beras industri tidak pernah melampaui proyek percontohan yang luasnya sekitar 100 ha. Hingga saat ini hanya tanaman komoditas ekspor termasuk minyak sawit dan serbuk kayu. Penerima manfaat utama proyek adalah konglomerat domestik yang besar, modal usaha patungan dari Korea Selatan (kebanyakan tertarik pada minyak sawit dan serbuk kayu), instansi setempat dan pemerintah Indonesia.

Hasilnya proyek ini mengancam rumah dan tanah di 169 desa di wilayah MIFEE Merauke. Sebenarnya perkebunan telah menyulitkan mereka menemukan makanan karena mereka kehilangan hutannya, sementara hasil perkebunan dijual di pasar sehingga tidak tersedia lagi buat masyarakat. Contoh: Penduduk melaporkan ada anak-anak yang meninggal akibat kekurangan nutrisi di salah satu wilayah konsensi Medco – salah satu dari sedikit perusahaan yang sedang mencoba menanam padi.⁴⁷

Dalam sembilan tahun sejak didirikan, MIFEE berfungsi sebagai proyek perluasan dan konversi lahan bagi perusahaan transnasional dari Asia Timur dan Tenggara. Hasilnya adalah perampasan tanah skala besar dan operasi militer. Korupsi merajarela dengan keterlibatan perusahaan kontroversial. Korupsi ini sering dikaitkan dengan politisi rakus yang ingin mendapatkan konsensi dan ijin yang kemudian dijual agar mereka mendapatkan untung.⁴⁸

Korupsi, kekerasan dan perusakan lingkungan serta pelanggaran HAM yang terkait dengan MIFEE telah menimbulkan perlawanan. Koalisi besar bernama Koalisi Masyarakat Sipil Tolak MIFEE yang mengkoordinasikan diskusi diantara sekitar 30 organisasi lokal dan nasional, seperti Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (Foker LSM Papua). Foker LSM mewakili 118 organisasi anggota di seluruh Papua.

⁴⁷ AwasMIFEE and GRAIN, Relaunching destruction in Papua: monoculture agriculture project threatens indigenous lands and livelihoods, August 2015, <https://www.grain.org/en/article/5247-relaunching-destruction-in-papua-monoculture-agriculture-project-threatens-indigenous-lands-and-livelihoods>

⁴⁸ Longgena Ginting, Oliver Pye, Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia, 2013, https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/37427/ssoar-aseas-2013-1-ginting_et_al-Resisting_agribusiness_development_the_Merauke.pdf

Proyek ini menyebabkan berbagai konflik dengan masyarakat adat setempat yang tanahnya telah diserahkan kepada perusahaan transnasional tanpa konsultasi dengan mereka. Hal ini dinyatakan dalam surat terbuka tertanggal 18 desember 2012 oleh 23 anggota kelompok masyarakat adat dari Baidub, Boha, Bupul, Erambu, Kindiki, Kweel, Muting, Pachas, Poo, dan desa Tanas yang menandatangani tuntutan dan aspirasi masyarakat adat di Kali Ban – Kali Maro, Papua, Merauke yang mempertanyakan sewa tanah mereka oleh pemerintah kabupaten.⁴⁹

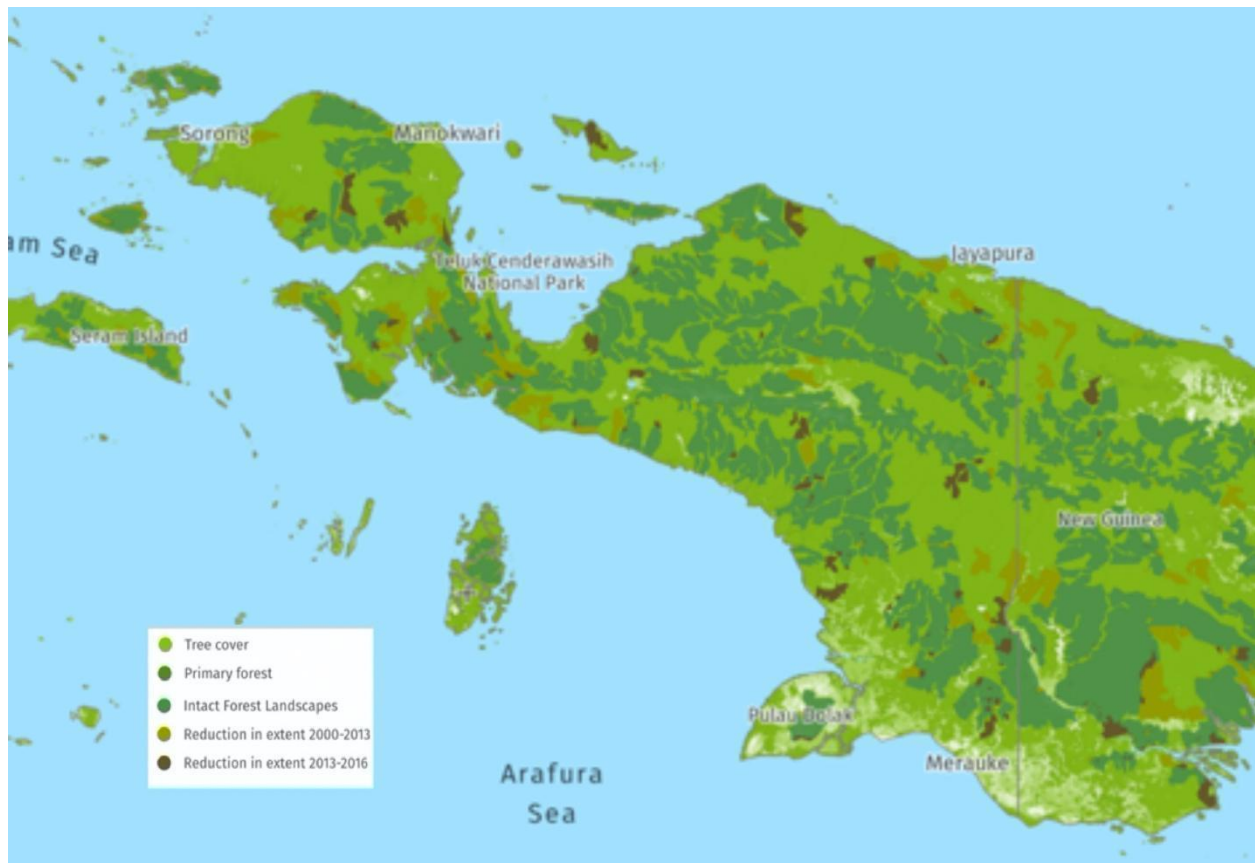
Sembilan tahun setelah peluncuran, proyek “MIFEE” hampir tidak menghasilkan pangan atau energi. Hal ini merupakan taktik dangkal yang telah merampas dan membuka lahan untuk pe-nebangan, atau mengkonversi menjadi perkebunan sawit atau akasia serta mengakselerasi industri ekspor lainnya. Dengan luasnya lahan yang belum diolah - hal ini sangat langka ditemukan di Sumatra, Kalimantan dan Jawa - Papua kini bagai wilayah terakhir “lahan tidak aktif” yang tersedia. Sebenarnya bukan tidak aktif atau kosong, melainkan lahan itu merupakan salah satu hutan hujan yang paling berharga di dunia karena habitat alamnya dan secara tradisi dihuni ratusan kelompok masyarakat adat. Hutan menyediakan mereka makanan dan bahan lainnya yang secara tradisi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.⁵⁰

⁴⁹ Demands and Aspiration of Indigenous Peoples of River (Kali) Bian – River (Kali) Maro, Papua, December 2012, <https://sawitwatch.or.id/download/Press%20Release%20Eng.pdf>

⁵⁰ World Resources Institute, Indonesia, <https://www.wri.org/blog/2018/11/indonesias-last-forest-frontier-3-facts-know-about-papua>

Papua, surga yang hilang

Papua adalah rumah bagi biodiversitas endemis yang sangat kaya dan bagi keragaman budayanya. Apa yang lenyap akibat penebangan yang korup dan industri minyak sawit akan mengulang kembali ratusan tahun sejarah evolusi. Ini bukan hanya kerugian untuk Papua tapi juga dunia. Mengingat proyek sebelumnya tanpa persiapan yang baik dan analisa dampak jangka panjang serta usaha mitigasi, maka “food estates” yang diusulkan pemerintah Indonesia sangat berisiko karena sekali lagi akan mengubah hutan menjadi perkebunan sawit atau serat kayu.



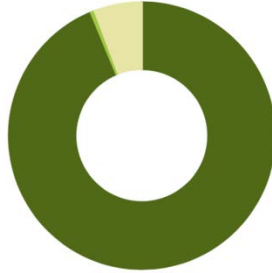
Pulau Nugini merupakan tempat hutan hujan tropis yang masih utuh yang terbesar di Asia-Pasifik. Tapi hutan-hutan ini terancam oleh perkembangan industri yang rakus yang mencari sumber daya alam (kayu, mineral) atau mengkonversi hutan alam menjadi perkebunan sawit.

Pulau Nugini sebagai nama lain pulau Papua menampung hutan tropis terbesar ke tiga di dunia setelah Amazon dan Basin Kongo. Pulau ini dibagi dua, sebagian milik negara Papua Nugini dan lainnya milik Indonesia (provinsi Papua dan Papua Barat). Ke dua provinsi ini sebelumnya merupakan tuan rumah hutan hujan tropis primer yang belum tersentuh. Tahun 2000 94% wilayah Papua tertutup oleh hutan alam. Meskipun penebangan berlangsung, akhir tahun 2012 hutan primer diperkirakan masih seluas 35,2 juta ha - berarti 86,2% dari total wilayah. Sebagai perbandingan; di Sumatra tahun 2012 hanya tersisa 13,4 juta ha hutan primer - berarti hanya 28,3% dari total

wilayah. Sementara untuk Kalimantan adalah 27,6 juta ha dan 51,9%.⁵¹ Di Papua hidup 15-20.000 spesies tumbuhan, 602 spesies burung, 125 spesies mamalia (setengahnya dari seluruh spesies adalah spesies endemis). Juga terdapat 223 spesies reptil hidup di sana, 35% darinya endemis.⁵² Tidak mengherankan jika sebuah artikel baru di majalah Nature mengatakan bahwa Pa-

pua adalah pulau yang terbanyak biodiversitasnya di dunia.⁵³

Natural Forest
29.4 Mha
Plantations
155 kha
Non-Forest
1.81 Mha



Ikonis hewan seperti tiga kangguru, burung cendrawasih, ikan pelangi, kupu-kupu sayap burung, hidup di hutan hujan ini. Di dua dekade terakhir telah ditemukan di pulau Papua atau sekitarnya lebih dari seribu spesies baru. Para ilmuwan telah menemukan rata-rata dua spesies tiap minggunya dari 1998 hingga 2008. Tapi saat ini hal itu

hampir tak pernah terdengar.⁵⁴

Pulau ini juga rumah bagi sekitar 312 kelompok masyarakat adat, ratusan bahasa termasuk beberapa suku yang belum pernah dihubungi.⁵⁵ Beberapa dari kelompok masyarakat adat ini punya bahasanya sendiri atau dialek. Hal ini menjadikan (bersama dengan Papua Nugini) sebagai wilayah keanekaragaman budaya manusia yang terpadat.

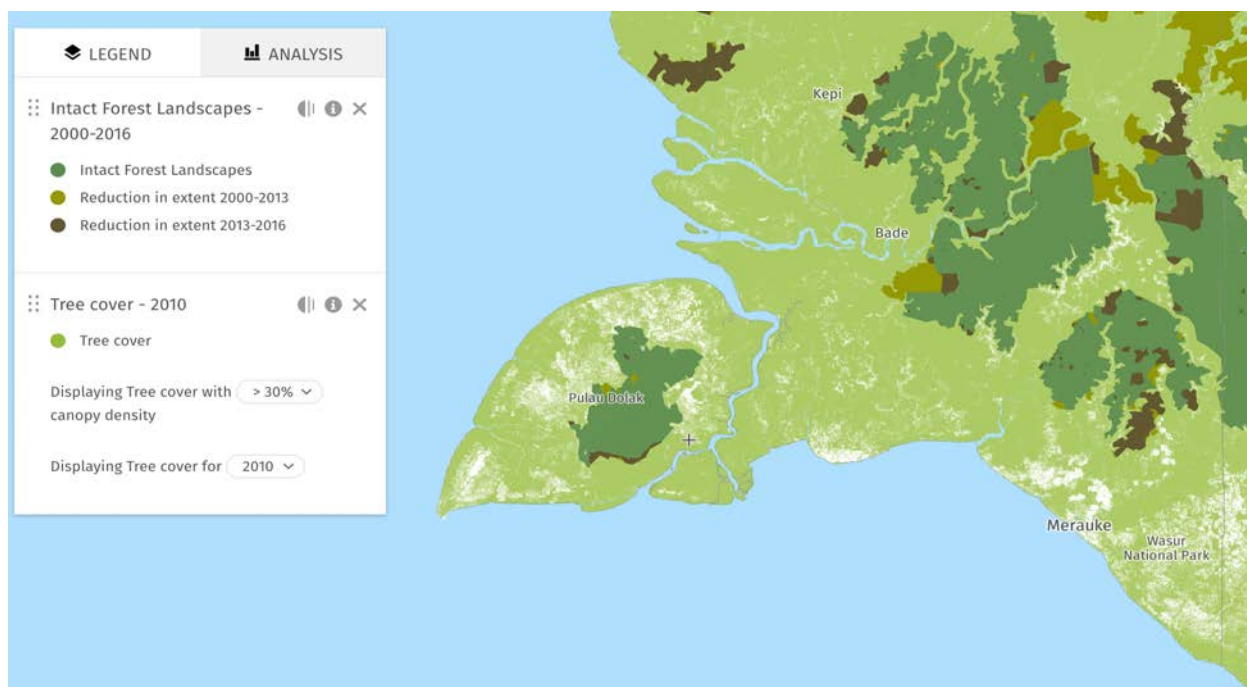
⁵¹ Nature Climate Change, Belinda Arunarwati Margono, Peter V. Potapov, Svetlana Turubanova, Fred Stolle & Matthew C. Hansen, Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012, 29 June 2014, <http://bit.ly/1naAaJH>

⁵² Sri Nurani Kartikasari et Al., Ekologi Papua, 2012, <https://sites.lsa.umich.edu/wp-content/uploads/sites/162/2014/09/Kartikasari-Marshall-Beehler-2012-Ekologi-Papua.pdf>

⁵³ Rodrigo Cámara-Leret et Al., New Guinea has the world's richest island flora, Nature, August 2020 <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2549-5>

⁵⁴ National Geographic, Thousands of New Species Found in New Guinea, June 2011, <https://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/pictures/110627-new-species-rare-animals-papua-new-guinea-wwf/>

⁵⁵ Survival International, Papuan Tribes, <http://bit.ly/1Vfr9gi>



Warna hijau lanskap hutan utuh, kuning dan coklat lanskap hutan utuh berturut-turut lenyap antara 2000-2013 dan 2013-2016.. [Global Forest Watch](https://www.globalforestwatch.org/)

Tapi Papua kini bukanlah lagi surga: Dengan tutupan hujan yang berkurang di Sumatra dan Kalimantan, Papua menjadi garda depan terakhir hutan di Indonesia yang masih utuh.⁵⁶ 2019 Papua kehilangan 22.700 ha hutan primer. Ini sebanding dengan 14,8 juta ton emisi CO₂⁵⁷. Banyak sekali spesies yang beresiko punah, bahkan sebelum ditemukan oleh ilmuwan – atau setelahnya ketika hutan mereka dihancurkan oleh “pembangunan” dalam tempo kasat mata.

Setelah terkena dampak yang parah di Kalimantan dan Sumatra, maka penebangan, minyak sawit dan industri pertambangan telah memusatkan perhatiannya pada pulau Papua sebagai mangsa berikutnya. Berbagai proyek baru untuk pertambangan, penebangan dan perkebunan sawit telah diajukan dan konsensi telah diberikan kepada perusahaan bayangan⁵⁸ yang sering korup dengan hubungan ke pemerintah dan kurangnya transparansi.⁵⁹

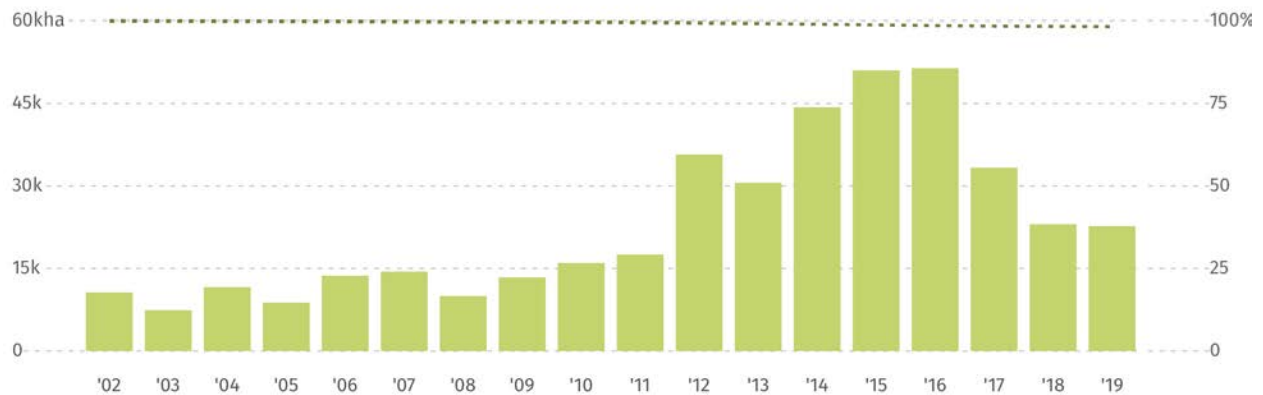
⁵⁶ World Resources Institute, Indonesia, <https://www.wri.org/blog/2018/11/indonesias-last-forest-frontier-3-facts-know-about-papua>

⁵⁷ Global Forest Watch, Indonesia, Papua, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/23/>

⁵⁸ Mongabay, A carbon bomb in Papua: 7 takeaways from our investigation, December 2018, <https://news.mongabay.com/2018/12/a-carbon-bomb-in-papua-7-takeaways-from-our-investigation/>

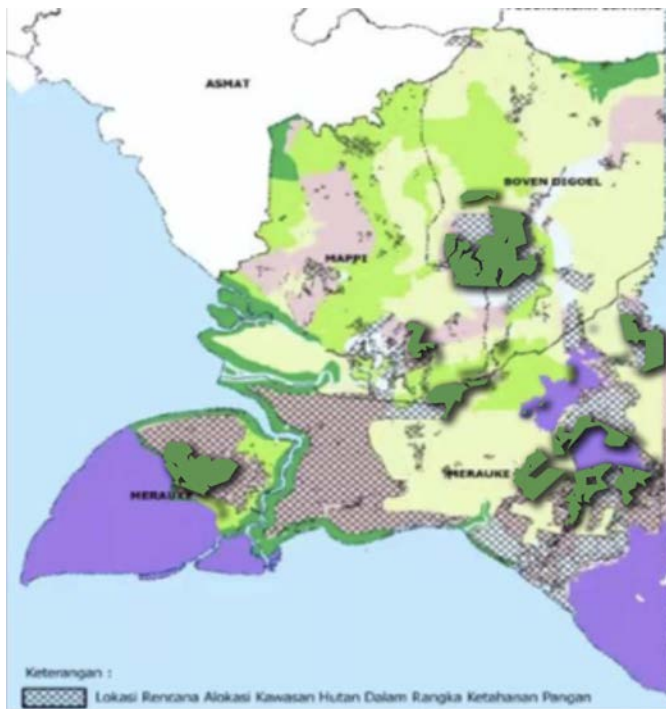
⁵⁹ Mongabay, Follow the permits: How to identify corruption red flags in Indonesian land deals, December 2019, <https://news.mongabay.com/2019/12/follow-the-permits-how-to-identify-corruption-red-flags-in-indonesian-land-deals/>

Hilangnya hutan primer di Papua dari 2002 hingga 2019



Sumber: [Global Forest Watch](http://www.globalforestwatch.org)

Papua bertahun-tahun berada di bawah pendudukan militer Indonesia. Di beberapa dekade lalu serangan berkali-kali kelompok separatis bersenjata (Organisasi Papua Merdeka, OPM) dibalas dengan semena-mena oleh tentara dan membuat episode kekerasan.



Perkembangan perkebunan dan industri penggalian lainnya sering menjadikan ketegangan, terutama ketika pihak industri datang menduduki tanah tradisi yang dikawal oleh polisi dan tentara. Militer punya kepentingan ekonomi di banyak proyek karena aktif di kegiatan bisnis.⁶⁰ Sejak pendudukan 1962, kebebasan berbicara sangat dibatasi dan aktivis dipenjarakan atau dilecehkan. Serangan berkali-kali OPM digunakan untuk melegitimasi pendudukan selanjutnya dan kriminalisasi setiap pembicaraan tentang kemerdekaan serta membungkam pihak yang menolak perampasan tanah.

Hijau tua: lanskap hutan yang utuh di dalam Food Estate Program - kemungkinan besar akan disingkir

Minyak sawit adalah penyebab utama deforestasi. Kurang dari sepuluh tahun

(2005-2014) perkebunan sawit bertambah dari 5 menjadi 21, sementara 20 perusahaan lainnya

⁶⁰ Awas MIFEE, "Three Years of MIFEE (part 2): First Villages Feel the Impact as the Plantation Menace Spreads", 23 October 2013, <http://bit.ly/160gEGU>

The International Coalition for Papua (ICF), Human Rights and Peace for Papua, Website, <http://bit.ly/247k6GO> Human Rights Watch, Something to hide? Indonesia's Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua, November 2015, <http://bit.ly/1TKFO9S>

sedang menyelesaikan ijinnya.⁶¹ 2005 terdapat 5 perkebunan sawit di Papua. Kurang dari sepuluh tahun berikutnya di 2014 terdapat 21 dengan 20 perusahaan lainnya dalam proses perijinan.⁶² Tutupan hutan berkurang dengan cepat. 2001 Papua memiliki 24,5 juta ha hutan primer (hutan utuh), yang berarti 78% dari luas Papua. Tahun 2019 seluas 22.700 ha hutan primer lenyap - sebanding dengan 14,8 juta ton emisi CO₂.⁶³ Meskit tempo perusakan sangat cepat tapi jangan menyerah! Masih ada waktu untuk mencegah bencana kerugian seperti yang sudah terjadi di Kalimantan dan Sumatra.

⁶¹ Pusaka, Awas MIFEE & local Papuan organisations, West Papua Oil Palm Atlas: The companies behind the plantation explosion, 5 May 2015, <http://bit.ly/1Mf5qR8>

Quartz, Steve Mollman, Palm oil's new frontier is the vast rainforest covering the world's second-largest island, 26 October 2015, <http://bit.ly/1M0WApM>

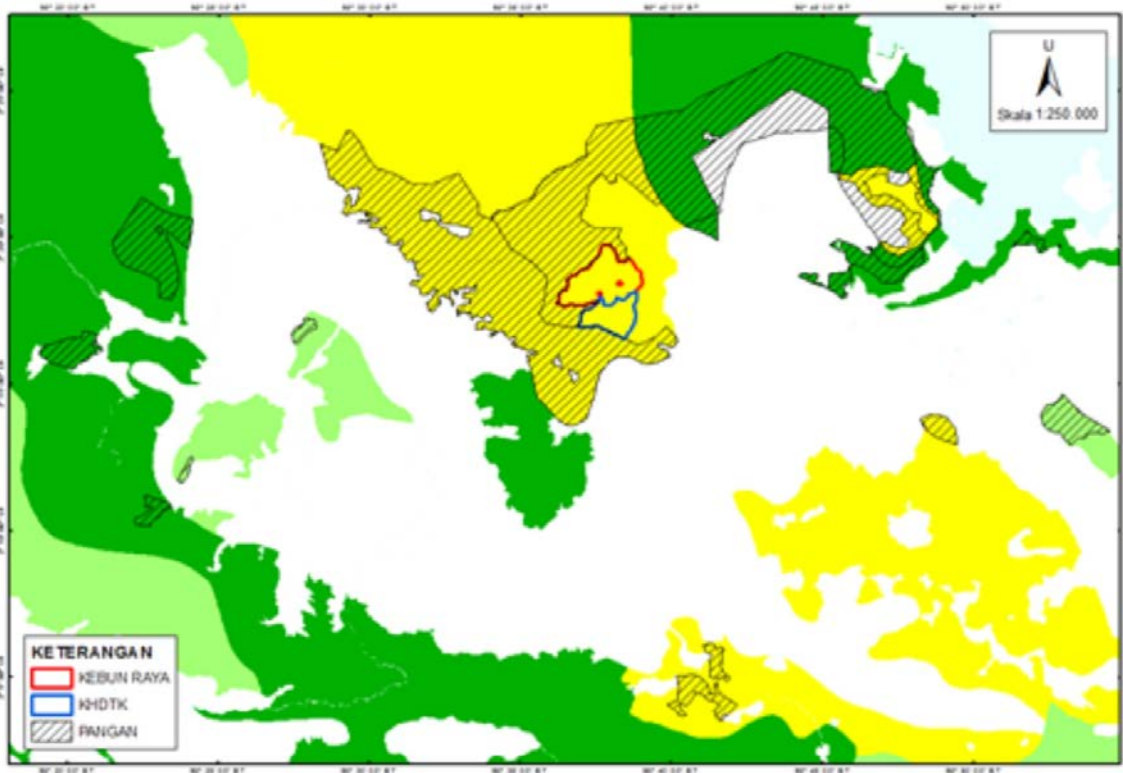
⁶² Pusaka, Awas MIFEE & local Papuan organisations, West Papua Oil Palm Atlas: The companies behind the plantation explosion, 5 May 2015, <https://www.forestpeoples.org/topics/agribusiness/publication/2015/west-papua-oil-palm-atlas-companies-behind-plantation-explosion>

Quartz, Steve Mollman, Palm oil's new frontier is the vast rainforest covering the world's second-largest island, 26 October 2015, <https://qz.com/530649/palm-oils-new-frontier-is-the-vast-rainforest-covering-the-worlds-second-largest-island/>

⁶³ Global Forest Watch, Indonesia, Papua, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/23/>

Food Estate Sumatra Utara

Di Sumatra Utara pemerintah berencana membangun food estates seluas 30.000 ha. Tapi sumber lain mengatakan 61.000 ha⁶⁴ di dataran tinggi. Pemerintah menyatakan bahwa suhu lebih dingin di dataran tinggi ini menjamin iklim yang baik buat kentang dan bawang putih dan memberikan model pengembangan tanaman seperti ini di dataran tinggi Papua yang sangat luas.



Peta perencanaan Food Estate. Sumber: [Ministry of Environment and Forestry of Indonesia](https://www.mongabay.com/2020/10/indonesia-food-estate-program-papua-sumatra-expansion/)

Pemerintah telah mengidentifikasi 19.000 ha wilayah yang rusak parah akibat produsen pulp dan kertas PT Toba Pulp Lestari. Perusahaan ini menguasai hampir 185.000 ha dan berkonflik dengan 25 desa, sebagian besar masyarakat adat Batak.⁶⁵ Mereka telah kehilangan hutan tempat memanen kemenyan, pusat budaya dan mata pencaharian mereka. Konflik tanah yang tajam ini berakhir dengan pemenjaraan penduduk desa yang berjuang mempertahankan tanah tradisi mereka.⁶⁶ Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁶⁷ proyek ini akan membutuhkan 30.000 ha lahan hutan. Hutan Lindung dan Produksi (atau juga HPT dan HPK) akan dilepas untuk dikonservasi ke perkebunan (HPK).

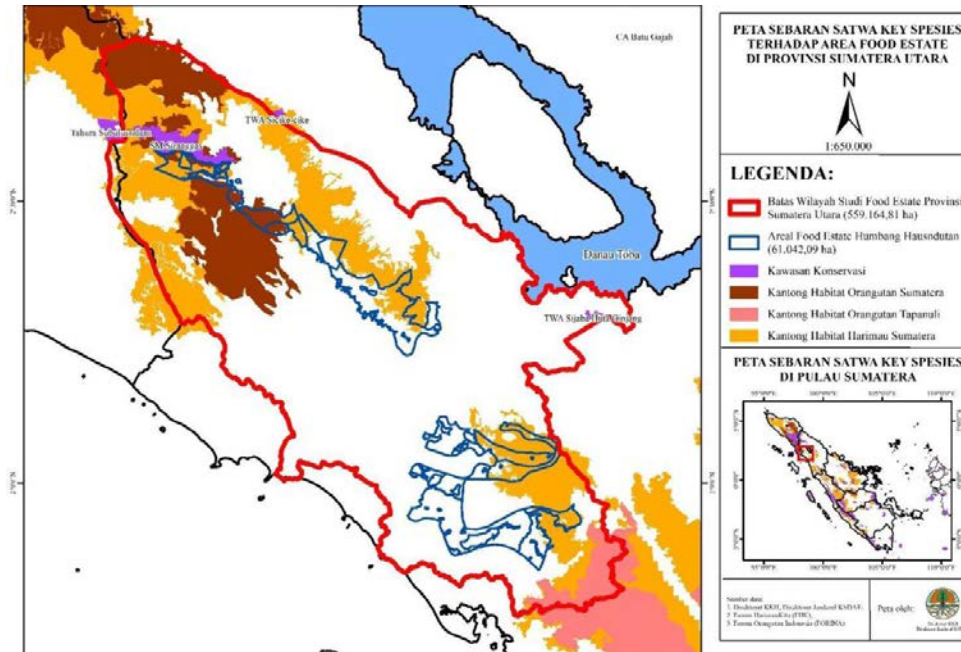
⁶⁴ Mongabay, Indonesia's food estate program eyes new plantations in forest frontiers, October 2020, <https://news.mongabay.com/2020/10/indonesia-food-estate-program-papua-sumatra-expansion/>

⁶⁵ Environmental Paper Network, Conflict Plantations: Chapter 2: Revealing Asia Pacific Resources International Limited's trail of disputes across Indonesia, November 2019, <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2019/09/APRIL-social-conflicts-mapping.pdf>

⁶⁶ Mongabay, Indonesian indigenous land defenders jailed in fight with pulpwood giant, MARCH 2020, <https://news.mongabay.com/2020/03/indonesia-indigenous-land-sumatra-toba-pulp-lestari-rge/>

⁶⁷ Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, see footnote 1

Peta pemerintah untuk program food estate tumpang tindih dengan 39% wilayah yang diketahui tempat habitat harimau sumatra dan 8% habitat orang utan sumatra serta 4 wilayah suaka alam: Taman Hutan Subulussalam, Suaka Margasatwa Siranggas, Taman Wisata Alam Sicike-cike dan Taman Wisata Alam Sijaba Hutaginjang.⁶⁸



Peta garis batas program food estate tumpang tindih dengan peta spesies penting di Sumatra Utara, diterbitkan oleh [Mongabay](#)

Sebagai contoh, di kabupaten Humbang Hasundutan program Food Estate telah berencana memakai lahan seluas 280 ha yang mana itu bisa berdampak pada desa Pandumaan, demikian Delima Silalahi, direktur LSM lokal Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM).⁶⁹

Terlepas saran dari organisasi masyarakat sipil untuk menggunakan program Food Estate agar lahannya bisa dikembalikan kepada masyarakat adat⁷⁰, hampir 80% dari 1000 ha lahan yang diharapkan ditanam tahun ini di Sumatra Utara ternyata akan dikelola oleh perusahaan agrobisnis⁷¹ dan pemerintah.⁷² Lima perusahaan termasuk perusahaan besar seperti PT Indofood Sukses

⁶⁸ Mongabay, Indonesia's plantation program on collision course with wildlife, Indigenous groups, January 2021, <https://news.mongabay.com/2021/01/indonesia-food-estate-program-wildlife-indigenous-groups/>

⁶⁹ Kompas, Masyarakat Adat Menanti Keberpihakan "Food Estate" Humbang Hasundutan, November 2020, <https://kompas.id/baca/nusantara/2020/11/23/masyarakat-adat-menanti-keberpihakan-food-estate-humbang-hasundutan/>

⁷⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Rapat Koordinasi Tindak Lanjut, Proses Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyediaan Lahan Food Estate di Provinsi Sumatera Utara, September 2020

⁷¹ Respectively: PT Calbe Wings, 200 ha; PT Champ, 250 ha; PT Indofood, 310 ha; PT Karya Tani Semeste, 5 ha; PT Semangat Tani, 5 ha; PT Agra Garlica, 5 Ha; PT AgriIndo Sejahtera, 10 ha. Total land managed by agribusiness companies 785 ha)

⁷² Voi.id, Pemerintah Siapkan 61.000 Ha Lahan di Sumut Jadi Kawasan Food Estate, September 2020, <https://voi.id/berita/15005/pemerintah-siapkan-61-000-ha-lahan-di-sumut-jadi-kawasan-i-food-estate-i>

Makmur dan PT Calbee Wings Food telah menyatakan ketertarikannya terlibat dalam program itu.⁷³ Pemerintah juga mencari investor dari Korea Selatan, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Qatar dan Tiongkok.⁷⁴

Extension of the Food Estate Program by regency and land use		
REGENCY	AREA FUNCTION	AREA (Ha)
KHDTK	Permanent production forests (HP)	500.00
KHDTK Total		500.00
KEBUN RAYA	Permanent production forests (HP)	1,150.00
KEBUN RAYA Total		1,150.00
	Permanent production forests (HP)	16602.00
KETAHANAN PANGAN	Protected forest (HL)	11,000.00
	Permanent production forests (HP)	16,602.00
	Limited production forests (H PT)	785.00
	Non-forest areas (APL)	2,628.00
KETAHANAN PANGAN Total		31,015.00
Grand Total		32,665.00

Rencana rinci lahan konversi buat program Food Estate, berdasarkan penggunaan lahan yang telah diumumkan. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / [Ministry of Environment and Forestry of Indonesia](#).

⁷³ Republika, Kementan Garap Proyek Food Estate Hortikultura Sumut, July 2020

⁷⁴ Kompas, Bertemu Wapres, Prabowo Sebut 4 Negara Tertarik Investasi Program "Food Estate, September 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/20044061/bertemu-wapres-prabowo-sebut-4-negara-tertarik-investasi-program-food-estate>

Kesimpulan

Rawan pangan adalah masalah nyata di Indonesia. Tapi laporan FAO terakhir menyatakan bahwa malnutrisi akan diperparah oleh pola makan yang tidak sehat. Maka disarankan untuk meningkatkan keragaman pangan dan mengurangi konsumsi nasi, lemak dan gula.⁷⁵ Sebaliknya pemerintah malah mendorong menanam padi, sawit dan gula. Meskipun ini sesuai dengan tujuan Food Estate, tapi pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proyek ini jarang memberi makan penduduk lokal, malah sebaliknya untuk memproduksi komoditi ekspor. Masyarakat lokal kehilangan mata pencahariannya dan menderita kerawanan pangan.

Di hutan ada ribuan orang yang bekerja dengan mencari nafkah di pertanian, mengumpulkan atau memburu produksi hutan. Produksi makanan mereka tidak dihitung ke dalam statistik GDP nasional (Produk Domestik Bruto) juga tidak ke dalam data produksi pangan, karena makanan mereka tidak dikomersilkan, artinya bukan komoditas dagang dan tidak dijual di pasar melainkan langsung dikonsumsi mereka. Tapi sekali tanah dan hutan mereka disita dan dirubah menjadi industri food estates, maka produksi pangan masal ini justru menjadi defisit pangan yang nyata, dengan kata lain menyebabkan kelaparan.

Keputusan menghibahkan lahan yang sangat luas kepada pertanian skala besar untuk produksi komoditas ekspor akan melanggar peraturan hukum Indonesia dan internasional:

- UU no.21/2001 tentang otonomi khusus memberikan hak kepada masyarakat adat Papua untuk memanfaatkan tanah, hutan dan airnya dan segala isinya yang sesuai dengan peraturan hukum.⁷⁶
- Keputusan Mahkamah Konstitusi⁷⁷ tahun 2013 mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan adatnya. Secara teori berarti pengembalian jutaan hektar lahan hutan yang sebelumnya dikuasai pemerintah kepada masyarakat adat dan pemilik tanah tradisi.⁷⁸
- Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat menjelaskan bahwa “Negara seharusnya menyediakan mekanisme yang efektif bagi pencegahan dan ganti rugi untuk (...) setiap tindakan yang bertujuan dan berakibat merampas tanah mereka, wilayah atau teritori.”⁷⁹
- ILO C1 69 – Konvensi masyarakat adat dan masyarakat suku⁸⁰

⁷⁵ “most Indonesians’ diets do not meet minimum dietary recommendations, but exceed recommended levels of dietary energy intake due to high consumption of rice, sugar and fats” in: FAO, The State of Food Security and Nutrition in the World 2020, <http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf>

⁷⁶ Law No. 21 of 2001, On Special Autonomy for the Papua Province, <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELEC-TRONIC/84431/106436/F207436146/IDN84431%20Idn.pdf>

⁷⁷ Normor 35/PUU-X/2012, https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/05/putusan_sidang_35%20PUU%202012-Kehutanan-telah%20ucap%2016%20Mei%202013.pdf

The International Coalition for Papua (ICF), Human Rights and Peace for Papua, Website, <http://bit.ly/247k6GO> Human Rights Watch, Something to hide? Indonesia’s Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua, November 2015, <http://bit.ly/1TKFQ9S>

⁷⁸ The Jakarta Post, Restoring forest rights restores sense of nationhood, June 2013, <https://www.thejakarta-post.com/news/2013/06/05/insight-restoring-forest-rights-restores-sense-nationhood.html>

⁷⁹ ILO, C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

⁸⁰ Undrip - United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, article 10, https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf

- Meluncurkan proyek skala besar seperti ini yang berdampak buruk bagi ratusan kelompok masyarakat di tengah-tengah masa lockdown yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 nampak bermaksud menutupi kegagalan menjalankan konsultasi yang tepat dengan kelompok masyarakat dan masyarakat adat. Ini jelas bertentangan dengan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) yang ditegaskan dalam Deklarasi Hak Masyarakat Adat dan bertentangan juga dengan rekomendasi FAO.⁸¹

Pernyataan pers baru-baru ini oleh Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Food Estate⁸² menolak pengu-
langan food estate di Papua dan telah menuntut Presiden Jokowi untuk menghentikan rencana
pengembangan food estate di Papua.

Belum jelas siapa yang akan membiayai Program Food Estate. Proyek ini saja di Kalimantan
Tengah membutuhkan 4,6 miliar USD. Sejauh ini belum ada informasi tentang biaya proyek se-
macam ini di Papua dan di beberapa provinsi lainnya.⁸³

The Japan Bank for International Cooperation baru-baru ini sepakat menginvestasi 4 miliar USD
untuk pendirian Sovereign Wealth Fund Indonesia (SWFI) yang kemungkinan bermitra dengan
otoritas investasi Abu Dhabi, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. 4 miliar USD lainnya telah dijan-
jikan U.S. International Development Finance Corporation⁸⁴. The Nusantara Investment Autho-
rity, itulah nama yang akan diberikan, mulai beroperasi di awal 2021 dan sedang berupaya mena-
rik investasi senilai Rp 225 triliun (16 miliar USD).

20 calon investor swasta Jepang⁸⁵ telah terlibat dalam pembicaraan dengan pemerintah Jepang
tentang SWFI tersebut

The Financial Times melaporkan bahwa Indonesia juga telah melobi perusahaan ekuitas swasta
dari AS termasuk Blackstone dan Carlyle untuk ambil bagian dalam SWFI. Para perusahaan ini
berusaha mengumpulkan hingga 15 miliar USD. Hal ini akan menandai minat investor setelah
Indonesia melewati reformasi total.⁸⁶

Menurut sumber yang sama, BlackRock, Blackstone, Carlyle dan JPMorgan telah melakukan
pembicaraan pendahuluan dengan pejabat Indonesia I Squared Capital. Juga dikonfirmasi te-
lah bertemu secara online dengan pejabat Indonesia membicarakan SWF serta peluang investasi

⁸¹ FAO, Free Prior and Informed Consent: An indigenous peoples' right and a good practice for local communities, 2016, <http://www.fao.org/3/a-i6190e.pdf>

⁸² Member of the he Civil Society Coalition consisting of CSOs based in Papua include the Indonesian Forum for the Environ-
ment (WALHI) Papua KPCCK Synod of GKI in Tanah Papua, the Association of Human Rights Advocates (PAHAM) Papua, the
Limited Association for the Study and Empowerment of Indigenous Peoples (pt.PPMA) Papua, SKP Merauke Archdiocese, Pa-
pua People's Network (JERAT), Bentala Rakyat Heritage Foundation, Papuan Franciscan SKPKC, Papua KIPRa and Papuan
Voices National Board. Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Food Estate di Papua, Hentikan Rencana Food Estate di Papua, Septem-
ber 2020, <https://pusaka.or.id/assets/2020/09/Siaran-Pers-Koalisi-Masyarakat-Sipil-Tolak-Food-Estate-di-Papua-Sept-2020.pdf>

⁸³ See footnote 28 CNBC Indonesia, Ternyata Bangun Lumbung Pangan Jokowi Butuh Rp 68 T, July 2020, [https://www.cnbcin-
donesia.com/news/20200710190521-4-171849/ternyata-bangun-lumbung-pangan-jokowi-butuh-rp-68-t](https://www.cnbcin-
donesia.com/news/20200710190521-4-171849/ternyata-bangun-lumbung-pangan-jokowi-butuh-rp-68-t)

⁸⁴ Bloomberg, Japan to Invest \$4 Billion in Indonesia's Sovereign Wealth Fund, December 2020, [https://www.bloom-
berg.com/news/articles/2020-12-05/japan-to-invest-4-billion-in-indonesia-s-sovereign-wealth-fund](https://www.bloom-
berg.com/news/articles/2020-12-05/japan-to-invest-4-billion-in-indonesia-s-sovereign-wealth-fund)

⁸⁵ Kakarta Globe, Japan Pledges \$4b to Indonesia's Sovereign Wealth Fund, December 2020, [https://jakartaglobe.id/business/ja-
pan-pledges-4b-to-indonesias-sovereign-wealth-fund](https://jakartaglobe.id/business/ja-
pan-pledges-4b-to-indonesias-sovereign-wealth-fund)

⁸⁶ Financial Times, Indonesia woos US private equity for new sovereign wealth fund, November 2020, [https://www.ft.com/con-
tent/36dbe6c2-9478-4b75-98c0-d569ba3c6dce](https://www.ft.com/con-
tent/36dbe6c2-9478-4b75-98c0-d569ba3c6dce)

infrastruktur di Indonesia. EIG Partners, Global Infrastructure Partners dan Stonepeak sepertinya juga tertarik, namun mereka menolak berkomentar.

Tugas utama Nusantara Investment Authority (NIA) yang bertujuan khusus membiayai Program Food Estate masih belum ditetapkan. Tapi NIA jelas bertugas mempromosikan infrastruktur di seluruh negeri. Karena NIA didirikan segera setelah pengumuman Program Food Estate, maka wajar menganggap bahwa SWFI mempunyai peranan penting untuk membiayai program itu.

Tuntutan

Bank, agen pembangunan dan institusi lainnya bisa mendapat pertanyaan untuk mendukung satu atau beberapa proyek Food Estate ini sebagai bantuan pasca Covid. Meskipun pasca Covid bantuan sangat diperlukan, tapi mereka hanya akan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan manusia. Spekulasi dan perampasan tanah hanya akan memperburuk dampak pandemi.

Lembaga keuangan tidak boleh mendukung proyek yang mengabaikan prinsip sebagai berikut (ditulis oleh LSM-LSM dari wilayah yang kemungkinan besar terkena dampak Food Estate):

- Pemerintah lokal dan nasional harus memastikan bahwa FPIC akan diimplementasikan, memberikan masyarakat tradisi hak penuh untuk memutuskan penggunaan tanah mereka dan sumber daya yang digunakan secara tradisi di hutan, sungai dan habitat lainnya.
- Setiap proyek harus berdasarkan pada pengakuan yang penuh atas kepemilikan tanah tradisi, yang berarti menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan penduduk yang berdasarkan pengetahuan lokal dan harus mendorong pengelolaan masyarakat tradisi.
- Proyek-proyek tidak boleh mendorong pemukiman kembali buruh dan petani dari luar wilayah atau menerapkan program transmigrasi.
- Setiap bagian dari proyek harus didefinisikan dalam proses yang transparan dan partisipatif, melibatkan sepenuhnya semua masyarakat adat dan lokal yang langsung atau tidak langsung terkena dampak dari kegiatan proyek. Kelompok-kelompok masyarakat ini harus punya hak penuh untuk menolak setiap proyek yang mereka anggap berdampak buruk terhadap sumber mata pencaharian atau tempat tinggal mereka.
- Tidak ada toleransi terhadap kekerasan, penggusuran, intimidasi, tekanan yang tidak semestinya atau korupsi yang tercermin dalam landasan setiap proyek.
- Tidak ada konservasi atau degradasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi dan habitat lainnya (HCVs) dan perlindungan penuh Stok Karbon Tinggi dan tanah gambut dengan kedalaman berapapun.
- Penilaian resiko lingkungan harus dijalankan dengan cara yang transparan, melibatkan masyarakat yang bisa terkena dampak langsung dan tidak langsung, pemangku kepentingan dan harus memperhatikan resiko sosial.
- Proyek harus mengintegrasikan restorasi lingkungan dan rehabilitasi hutan dan tanah gambut yang rusak dan hilang dengan menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan lokal.